

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS PUBLISITAS DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH**

Oleh:

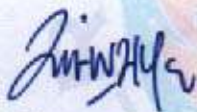
NUR KHALIZAH LIPUTO

NIM: 271 414 167

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan wisuda

Pembimbing I,

Pembimbing II,



HJ. Nirwan Junus, SH., MH
Nip. 19690602200003 2 001



Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
Nip. 19850827 200912 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutve Imran, SH. MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**“PENERAPAN ASAS PUBLISITAS DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH”**

OLEH :

NUR KHALIZAH LIPUTO

NIM : 271 414 167

Telah diperiksa dan disetujui

DEWAN PENGUJI

1. **Mutia Cherawati Thalib SH.M.HUM** ()
NIP. 19690704 199802 2 001


2. **Ismail H Tomu S.H., M.H** ()
NIP. 197706 200912 1 003

3. **Nirwan Junus S.H., M.H** ()
NIP. 19690602 200003 2 001

4. **Dolot Alhasni Bakung S.H., MH** ()
NIP. 19850827 200912 1 005

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum




Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031 001

ABSTRAK

NUR KHALIZAH LIPUTONIM : (271 414 167) 2018. “PENERAPAN ASAS PUBLISITAS DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH BERDASARAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997”.
Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : HJ. Nirwan Junus, SH.,
MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH.
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan asas publisitas dalam penerbitan sertifikat tanah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif di dukung data lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan asas publisitas dalam penerbitan sertifikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango tidak diterapkan. Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango hanya menerapkan masa sanggah sebelum sertifikat diterbitkan selama 60 Hari. Tetapi untuk pengumuman kepada masyarakat luas sebelum sertifikat diterbitkan tidak diterapkan. Tentu ini melanggar Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai asas publisitas.

Akibat hukum apabila tidak diterapkan asas publisitas ini adalah akan menimbulkan masalah-masalah hukum mengenai sertifikat tanah yang diterbitkan, terutama mengenai sertifikat ganda. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengumuman sebelum sertifikat diterbitkan.

Kata Kunci: Penerapan, Asas Publisitas, Penerbitan Sertifikat

ABSTRACT

NUR KHALIZAH LIPUTO STUDENT ID: (271 414 167). 2018.
"IMPLEMENTATION OF PUBLICITY PRINCIPLES IN ISSUANCE OF
LAND CERTIFICATES BASED ON GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 24 OF 1997". Principal Supervisor: HJ. Nirwan Junus, SH., MH. Co-
supervisor: Dolot Alhasni Bakung, SH., MH Department of Law, Faculty of Law,
Universitas Negeri Gorontalo.

The purpose of this study is to find out how the application of the principle of publicity in the issuance of land certificates is based on government regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in the Land Agency of Bone Bolango Regency. The type of research used in this study is the type of normative research supported by field data.

The results showed that the application of the principle of publicity in the issuance of certificates was based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration in the Land Agency of Bone Bolango Regency which was not implemented. The Bone Bolango Regency Land Agency only applies the objection period before issuing certificates for 60 days. However, the notice to the general public before the certificate is issued is not applied. Of course, this violates Article 26 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning the principle of publicity.

If this principle of publicity is not applied, it will cause legal problems regarding the certificate of land issued, especially regarding multiple certificates. It is because there is no announcement before the certificate is issued.

Keywords: Application, Publicity Principles, Certificate Issuance

